

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DI KANTOR KECAMATAN KOTA MEDAN

**Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

**Ida Dame, SE**

*Alumni Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. Jenis penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda, asumsi klasik, uji F dan uji t dengan menggunakan software SPSS. Berdasarkan hasil penelitian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada seluruh Kantor Kecamatan di Kota Medan karena hasil signifikan  $t < 0,05$ . Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada seluruh Kantor Kecamatan di Kota Medan karena hasil signifikan  $F < 0,05$ . Koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 89,4% akuntabilitas keuangan dapat diperoleh dan dijelaskan oleh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian. Sedangkan sisanya 10,6% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model.*

**Kata Kunci :** *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Aktivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Keuangan*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, warga negara yang semakin kritis dan cerdas menginginkan terciptanya suatu pemerintahan yang transparansi serta pengawasan internalnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dalam mengelola keuangan negara, dibutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian intern dimana sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Medan gagal memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016. Dari target Rp 5,49 triliun, realisasi hingga akhir tahun 2016 hanya Rp 4,308 triliun atau hanya 78,58 persen, hal ini menunjukkan perlu diperhatikannya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian (<http://www.rmolsumut.com>, diakses hari Jumat, tanggal 10

November 2017, Pukul:14.00 Wib). Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka peneliti berniat untuk meneliti tentang seberapa besar “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan”.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan?

## C.TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

##### a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku” (Mamesah, 2015:16). Dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang investasi milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di samping itu, pengurusan akuntansi keuangan daerah di bagi menjadi dua, yakni pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum juga dibagi menjadi dua, yaitu otorisator dan ordonator.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD (Erlina, 2013:6). Akuntansi adalah suatu sistem yang mengelolah input (masukan) dan menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Basis Akuntansi terdiri dari :

##### 1) Akuntansi Berbasis Kas (*Cash Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.

##### 2) Akuntansi Berbasis Akrua (*Accrual Based Accounting*)

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada

pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling canggih. Keberhasilan *New Zealand* menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, masih menggunakan basis akuntansi "*cashtoward accrual*".

### 3) Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Based Accounting*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Erlina (2013:20) menerangkan juga bahwa pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi laporan keuangan pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/ Kabupaten terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam LRA terdiri dari Pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, maka LRA memerlukan konversi, yaitu belanja tidak langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk belanja langsung konversi sebagai berikut:

- a) Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai.
- b) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang.
- c) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.

### b. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Di Dalam Akuntansi

Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dengan akuntansi sektor publik privat, dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga nonprofit dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik. Oleh karena Pemerintah Daerah merupakan satuan organisasi yang nonprofit, maka akuntansi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, yakni akuntansi keuangan daerah termasuk ke dalam akuntansi sektor publik. Akuntansi terdiri atas tiga bidang utama dikemukakan oleh Halim (2015:27), yakni akuntansi komersial/perusahaan (*commercial accounting*), akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*), dan akuntansi sosial (*social accounting*). Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Lingkup akuntansi pemerintahan, adalah : Akuntansi pemerintahan Pusat dan Akuntansi pemerintahan Daerah (terdiri dari : Akuntansi Pemerintahan Provinsi dan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten/Kota.).

### c. Sistem Pencatatan

Pengertian pengakuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry* dan *triple entry*. Salah satu membedakan pembukuan dan akuntansi adalah dalam menggunakan sistem pencatatan. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan *double entry* dan *triple entry*.

#### d. Siklus Akuntansi

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, inputnya adalah bukti atau dokumen seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D LS), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum (BKU). Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Tahapan tersebut adalah : Dokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut, Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal, Meringkas (mem-posting) transaksi keuangan yang telah dijurnal dalam buku besar, Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkan saldo-saldo buku besar dalam neraca saldo, Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling *up to date*, Menentukan saldo buku besar setelah disesuaikan, Menyusun laporan keuangan, Menutup buku besar dan Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam Neraca Saldo setelah tutup buku.

#### e. Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan seta *perencanaan* untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung disebut sebagai pemakai laporan keuangan pemerintahan daerah. Pemakai laporan keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah : DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Badan Eksekutif, Badan Pengawas Keuangan, Investor, Kreditor dan Donatur, Analis Ekonomi Pemerintah Daerah, Rakyat, dan Pemerintah Pusat.

#### f. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintahan Daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna *membayai* kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran (Mamesah, 2015:20). APBD adalah suatu Anggaran Belanja Daerah, dimana bahwa suatu Anggaran Daerah, termasuk APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
- 2) Adanya sumber penerimssn yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

## 2. Transparansi

Menurut Erlina (2013:66), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan *kepentingan* masyarakat. (Chabib, 2010:87).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Dhaka, 2014:45).

### 3. Aktivitas Pengendalian

Pengendalian secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan (Arens, 2010:76). Arens (2010:98) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri.

### 4. Akuntabilitas Keuangan

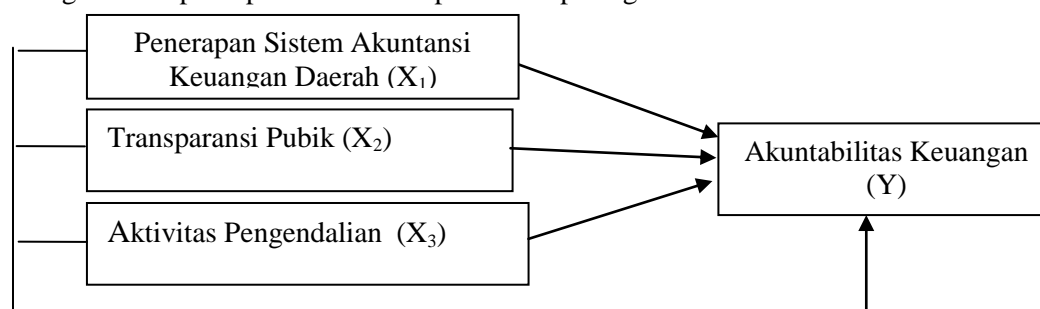
Menurut Muda (2014), akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* sebagaimana dikutip oleh Rasdianto (2014:162) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja, tetapi juga kinerja yang telah disepakati bersama dalam hal ini antara eksekutif daerah dan legislatif daerah selaku wakil rakyat di daerah.

### B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian yaitu menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Akuntabilitas terbentuk dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang maka perlu untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, menunjang pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah maka harus perlu dikembangkan dan disusun sistem akuntansi keuangan daerah yang tepat (Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 355 / KMK07 Tahun 2001), tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP. 2008:54). Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyusun paket undang-undang keuangan negara yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan standar atau acuan dalam melaksanakan tata-kelola dan pertanggungjawaban keuangan, atas pelaksanaan APBN / APBD. Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu :

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan.
2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan.

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi (Sugiyono, 2010).

#### A. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya, yang ada di lapangan.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X <sub>1</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basis akuntansi</li> <li>2. Unsur-unsur laporan realisasi anggaran</li> <li>3. Penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006</li> <li>4. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2004 (Erlina, 2013:6).</li> </ol>	Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD (Erlina, 2013:6).	Likert
Transparansi Publik (X <sub>2</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi dalam pengelolaan APBD</li> <li>2. Keterbukaan alam penerimaan dan penggunaan dana di tiap-tiap SKPD</li> <li>3. Kemudahan mengakses data Sistem komunikasi organisasi (Erlina, 2013:66).</li> </ol>	Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Erlina, 2013:66).	Likert
Aktivitas Pengendalian (X <sub>3</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harus sesuai prinsip akuntansi</li> <li>2. Perekrutan dan pengembangan SDM</li> <li>3. Tugas prosedur dalam pekerjaan</li> <li>4. Kesesuaian</li> <li>5. Pemisahan tugas</li> </ol>	Memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti	Likert

	6. Independen (Arens, 2010:76)	apa yang telah direncanakan (Arens, 2010:76).	
Akuntabilitas Keuangan (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan APBD disajikan terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat</li> <li>2. Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD</li> <li>3. Proses dan pertanggungjawaban APBD diawasi secara terus menerus</li> <li>4. Penyajian APBD telah menyertakan informasi masa lalu.</li> <li>5. Dalam mengevaluasi APBD hanya memperbandingkan dengan realisasi /sesungguhnya (Muda, 2014).</li> </ol>	<p>Pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara priodik. (Muda, 2014)</p>	Likert

## B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Kota Medan, sehingga total populasi yang menjadi sampel adalah sebanyak 21 Kecamatan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Insidental sampling* yaitu non-probabilitas sampling teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman, kedekatan mereka kepada peneliti dan secara kebetulan. Sampel penelitian dilakukan di 10 Kantor Kecamatan di Kota Medan yaitu Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat, dengan menggunakan metode survei yaitu melalui kuesioner.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuisisioner/angket yaitu kuisisioner langsung, yaitu daftar pertanyaan dikirim atau diserahkan langsung kepada orang yang di mintai pendapat, keyakinan atau diminta menceritakan tentang dirinya sendiri.

## D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kualitas data dan uji reliabilitas data sebelum melanjutkan kepengujian asumsi klasik.

### 1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data meliputi :

#### a. Uji Validitas

Pada suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut. Persyaratan uji validitas setiap pertanyaan  $> 0,30$  maka butir pertanyaan dianggap valid.

#### b. Uji Reliabilitas (kehandalan)

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran variabel-variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Suatu instrument dikatakan reliabel jika mempunyai nilai alpha positif dan lebih besar dari 0,6. Dimana semakin besar nilai alpha, maka alat pengukur yang digunakan semakin handal (reliabel).

### 2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan regresi terdapat syarat yang harus dilalui yaitu melakukan uji asumsi klasik.

Model regresi harus bebas dari asumsi klasik yaitu, uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedasitas (Ghozali, 2008:90).

#### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai

residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2008:91). Syarat dalam analisis parametrik yaitu data harus normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2008 : 91). Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain jika variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2008).

### 3. Model Pengujian Hipotesis

a. Regresi Linier Berganda

Model Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*), bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Model regresi linear berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, baik multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Model persamaanya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

b. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji Signifikan Parsial (Uji-t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Priyatno, 2009:103). Hipotesis nol, atau  $H_0 : b_i = 0$ , artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yaitu :

- 1) Jika nilai signifikan  $> \alpha$  (0,05),  $H_0$  diterima
- 2) Jika nilai signifikan  $< \alpha$  (0,05),  $H_0$  ditolak.

c. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji signifikan (Uji-F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Priyatno, 2009 ). Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendaknya diuji apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau :  $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$ , artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yaitu :

- 1) Jika nilai signifikan  $> \alpha$  (0,05),  $H_0$  diterima
- 2) Jika nilai signifikan  $< \alpha$  (0,05),  $H_0$  ditolak

d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi terletak pada tabel summary dan tertulis *R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*. Nilai *R Square* dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai 1.



#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pengujian Kualitas Data

##### a. Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar angket yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar ( $>$ ) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid.

**Tabel 4.1 Uji Validitas ( $X_1$ ) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**  
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X1.1	13.5667	6.806	<b>.780</b>	.740
Pernyataan X1.2	13.4000	6.593	<b>.708</b>	.756
Pernyataan X1.3	13.5333	7.637	<b>.461</b>	.830
Pernyataan X1.4	13.5667	6.806	<b>.780</b>	.740
Pernyataan X1.5	13.4000	7.834	<b>.403</b>	.848

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.1 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

**Tabel 4.2 Uji Validitas ( $X_2$ ) Transparansi Publik**  
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X2.1	22.3000	11.941	<b>.475</b>	.648
Pernyataan X2.2	21.7000	14.148	<b>.359</b>	.680
Pernyataan X2.3	22.2667	13.857	<b>.318</b>	.690
Pernyataan X2.4	22.0000	15.034	<b>.347</b>	.686
Pernyataan X2.5	21.7667	11.702	<b>.481</b>	.647
Pernyataan X2.6	21.5333	13.775	<b>.333</b>	.686
Pernyataan X2.7	22.2333	11.702	<b>.577</b>	.618

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.2 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 7 (tujuh) butir pertanyaan pada variabel transparansi publik dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

**Tabel 4.3 Uji Validitas (X<sub>3</sub>) Aktivitas Pengendalian**  
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X3.1	13.0667	5.651	<b>.782</b>	.787
Pernyataan X3.2	13.0667	5.651	<b>.782</b>	.787
Pernyataan X3.3	13.2000	5.890	<b>.631</b>	.826
Pernyataan X3.4	13.1000	6.162	<b>.509</b>	.860
Pernyataan X3.5	13.1667	5.868	<b>.622</b>	.828

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.3 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel aktivitas pengendalian dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

**Tabel 4.4 Uji Validitas (Y) Akuntabilitas Keuangan**  
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan Y.1	13.1667	6.006	<b>.441</b>	.825
Pernyataan Y.2	13.4000	5.283	<b>.643</b>	.768
Pernyataan Y.3	13.3000	5.183	<b>.635</b>	.770
Pernyataan Y.4	13.2667	4.961	<b>.762</b>	.730
Pernyataan Y.5	13.2667	5.720	<b>.554</b>	.794

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.4 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel akuntabilitas keuangan dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

b. Pengujian Reliabilitas

Angket dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60.

**Tabel 4.5 Uji Reliabilitas (X<sub>1</sub>) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**  
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
<b>.821</b>	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.5 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,821 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah reliabel atau dikatakan handal.

**Tabel 4.6 Uji Reliabilitas (X<sub>2</sub>) Transparansi Publik**  
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.700	7

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.6 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar  $0,700 > 0,60$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 7 butir pernyataan pada variabel transparansi publik adalah reliabel atau dikatakan handal.

**Tabel 4.7 Uji Reliabilitas (X<sub>3</sub>) Aktivitas Pengendalian**  
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.849	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.7 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar  $0,849 > 0,60$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel aktivitas pengendalian adalah reliabel atau dikatakan handal.

**Tabel 4.8 Uji Reliabilitas (Y) Akuntabilitas Keuangan**  
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.815	5

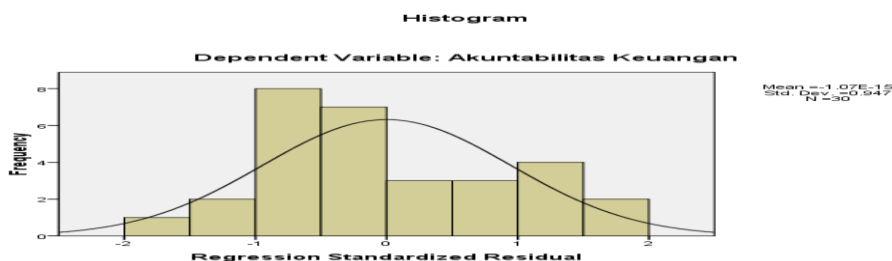
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.8 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar  $0,815 > 0,60$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel akuntabilitas keuangan adalah reliabel atau dikatakan handal.

## 2. Pengujian Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

## b. Uji Multikolinieritas

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. *Variance Inflation Factor* (VIF) =  $1/\text{Tolerance}$ , jika VIF = 0 maka  $1/10 = 0.1$ .

Uji Multikolinieritas dari hasil angket yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.296	1.171	-.253	.802		
	<b>Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</b>	.174	.082	2.109	.045	<b>.409</b>	<b>2.444</b>
	<b>Transparansi Publik</b>	.142	.051	2.763	.010	<b>.658</b>	<b>1.519</b>
	<b>Aktivitas Pengendalian</b>	.630	.092	6.814	.000	<b>.395</b>	<b>2.533</b>

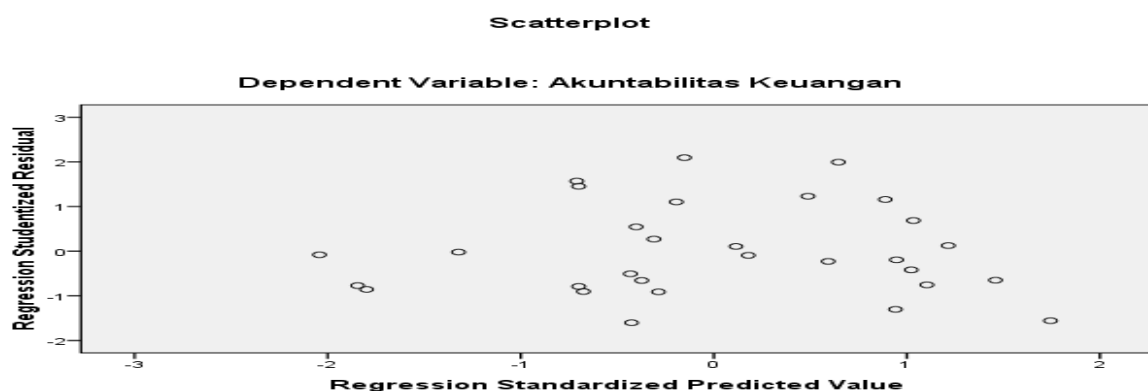
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah  $2,444 < 10$ , transparansi publik  $1,519 < 10$  dan aktivitas pengendalian  $2,533 < 10$ , serta nilai *Tolerance* penerapan sistem akuntansi keuangan daerah  $0,409 > 0,10$ , transparansi publik  $0,658 > 0,10$  dan aktivitas pengendalian  $0,395 > 0,10$  sehingga terbebas dari multikolinieritas.

## c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain jika variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2008).



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

**Gambar 4.2 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa

model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Regresi Linier Berganda

Model Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*), bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas (*Independen*). Rumus analisis regresi berganda dibawah ini.

**Tabel 4.10 Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.296	1.171	-.253	.802		
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.174	.082	2.109	.045	.409	2.444
	Transparansi Publik	.142	.051	2.763	.010	.658	1.519
	Aktivitas Pengendalian	.630	.092	6.814	.000	.395	2.533

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -0,296 + 0,174 X_1 + 0,142 X_2 + 0,630 X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- 1) Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai akuntabilitas keuangan (Y) adalah sebesar -0,296.
- 2) Jika terjadi peningkatan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 1, maka akuntabilitas keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,174.
- 3) Jika terjadi peningkatan transparansi publik sebesar 1, maka akuntabilitas keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,042.
- 4) Jika terjadi peningkatan aktivitas pengendalian sebesar 1, maka akuntabilitas keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,630.

#### b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikan (Uji-F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Priyatno, 2009). Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* (=0,05). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.

**Tabel 4.11 Uji Simultan  
ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	212.836	3	70.945	<b>82.482</b>	<b>.000<sup>a</sup></b>
	Residual	22.364	26	.860		
	Total	235.200	29			

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian, Transparansi Publik, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.311 di atas dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 82,482 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 2,98 yang dapat dilihat pada  $\alpha = 0,05$  (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$ , maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima  $H_a$  (tolak  $H_0$ ) atau hipotesis diterima.

c. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Signifikan Parsial (Uji-t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Priyatno, 2009).

**Tabel 4.12 Uji Parsial  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.296	1.171	-.253	.802		
	<b>Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</b>	.174	.082	<b>2.109</b>	<b>.045</b>	.409	2.444
	<b>Transparansi Publik</b>	.142	.051	<b>2.763</b>	<b>.010</b>	.658	1.519
	<b>Aktivitas Pengendalian</b>	.630	.092	<b>6.814</b>	<b>.000</b>	.395	2.533

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa:

- 1) Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan.  $t_{hitung}$  sebesar 2,109 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,705 dan signifikan sebesar 0,045, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  1,705 dan signifikan  $0,045 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menyatakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan.
- 2) Pengaruh transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan.  $t_{hitung}$  sebesar 2,763 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,705 dan signifikan sebesar 0,010, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  1,705 dan signifikan  $0,010 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menyatakan transparansi publik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan.

## 3) Pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan.

$t_{hitung}$  sebesar 6,814 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,705 dan signifikan sebesar 0,000, sehingga  $t_{hitung}$  6,814 >  $t_{tabel}$  1,705 dan signifikan 0,000 < 0,05, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menyatakan aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan.

## d. Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi terletak pada tabel summary dan tertulis *R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah *Square* variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

**Tabel 4.13 Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.951 <sup>a</sup>	.905	<b>.894</b>	.92744

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian, Transparansi Publik, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa angka *Adjusted R Square* 0,894 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 89,4% akuntabilitas keuangan dapat diperoleh dan dijelaskan oleh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian. Sedangkan sisanya 100% - 89,4% = 10,6% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja, pengawasan dan lain-lain.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, dimana  $t_{hitung}$  2,109 >  $t_{tabel}$  1,705 dan signifikan 0,045 < 0,05. Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Soleha (2014) dan Fathia (2017), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

### 2. Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, dimana  $t_{hitung}$  2,763 >  $t_{tabel}$  1,705 dan signifikan 0,010 < 0,05. Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiawan (2016), yang menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam mengelola keuangan negara, dibutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

### 3. Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, dimana  $t_{hitung}$  6,814 >  $t_{tabel}$  1,705 dan signifikan 0,000 < 0,05. Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiawan (2016), yang menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **4. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Hasil menunjukkan bahwa secara simultan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, dimana  $F_{hitung} 82,482 > F_{tabel} 2,98$  dan signifikan  $0,000 < 0,05$ . Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Soleha (2014), Fathia (2017) dan Setiawan (2016), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa dengan meningkatnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik, maka akuntabilitas keuangan akan meningkat.

### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan.
2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan temuan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi organisasi disarankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam bidang akuntansi dan pengelola keuangan negara melalui meminta bantuan tenaga akuntan, merekrut tenaga-tenaga akuntan, mengirimbkan pejabatnya pada berbagai perguruan tinggi yang memiliki jurusan akuntansi ataupun berbagai pelatihan bimbingan teknis kedinasan dan mengenai akuntansi administrasi keuangan Negara.
2. Bagi organisasi, supaya memperhatikan para pengelola keuangan daerah sebagai salah satu bentuk usaha organisasi publik meningkatkan peningkatan kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang diantaranya adalah dengan penempatan personil yang tepat, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan jenjang pendidikan dengan memberikan kesempatan untuk studi lebih lanjut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arens, A.A. et. al. 2010. *Auditing and Assurance Services – An Integrated Approach*. New York: Pearson Education.
- Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus media.
- Dhaka, 2014. *Ensuring Transparency and Accountability in Financial Sector*. The Financial Express.
- Erlina dan Rasdiato, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Brama Ardian. Medan.
- Fathia, Nurul. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Provinsi Riau). JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.



- Ghozali. 2008. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat: Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan No.355 / KMK07 Tahun 2001, Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Mamesah, D.J. 2015. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Muda, I., & Rasdianto, M. S. L. (2014). Implementation of the Cash Revenue System: A Case Study in the Local Government Task Forces' Units of North Sumatera Province, Indonesia. *Information Management & Business Review*, 6(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903 / 2735/ SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001.
- Rasdianto, N., & Muda, I. (2014). Analysis on the Timeliness of the Accountability Report by the Treasurer Spending in Task Force Units in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 4(4), 176-190.
- Soleha, Nurhayati. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Jurnal Etikonomi* Vol. 13 No. 1 April 2014.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Penerbit : CV Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- <http://www.rmolsumut.com/read/2017/04/10/46544/Pemko-Medan-Gagal-Penuhi-Target-PAD-2016->. (Diakses hari Jumat, tanggal 10 November 2017, Pukul: 14.00 Wib).